



H A R I A N
LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

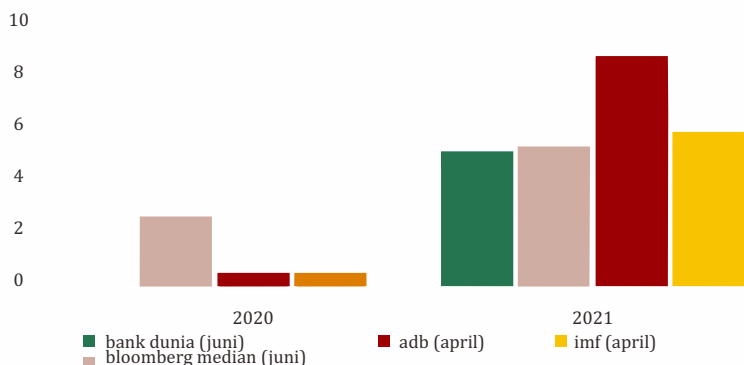
EDISI SELASA / 23 Juni 2020

WASPADA! LONCENG RESESI EKONOMI MULAI BERBUNYI

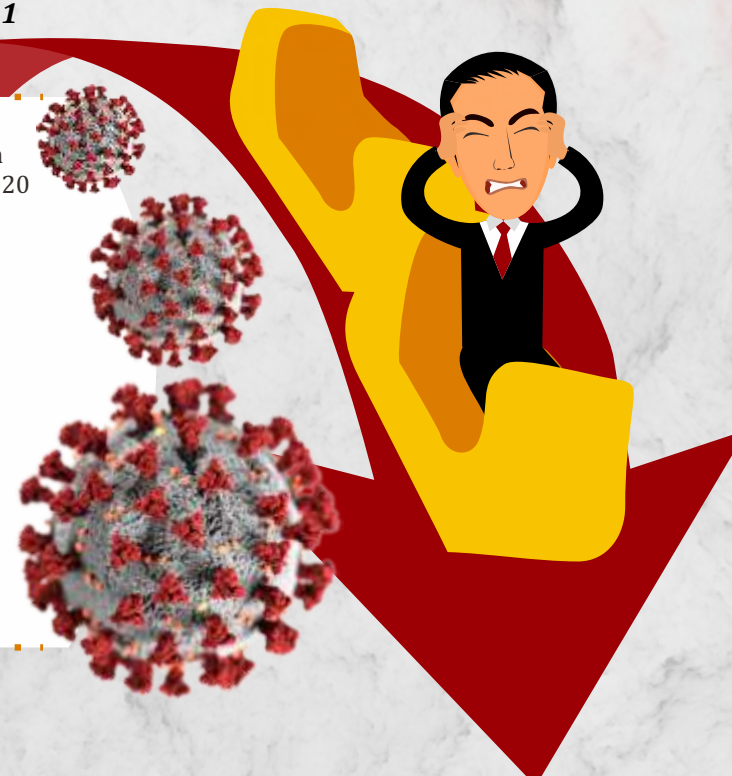
Korban virus Covid-19 di Indonesia terus naik. Hingga Senin (22/6) ada penambahan kasus baru sebanyak 954 sehingga total menjadi 46.845 kasus dan 2.500 diantaranya meninggal dunia. Ironisnya, akibat corona tingkat kemiskinan di Indonesia juga membengkak 10,63 persen, yakni dari 24,79 juta penduduk miskin menjadi 28,7 juta orang. Pemerintah pun mulai membunyikan 'lonceng' tanda bahaya sektor ekonomi, sebab resesi sudah di depan mata. Waspada

Baca Hal 11

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan 2021
Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, World Bank Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Bloomberg, 2020

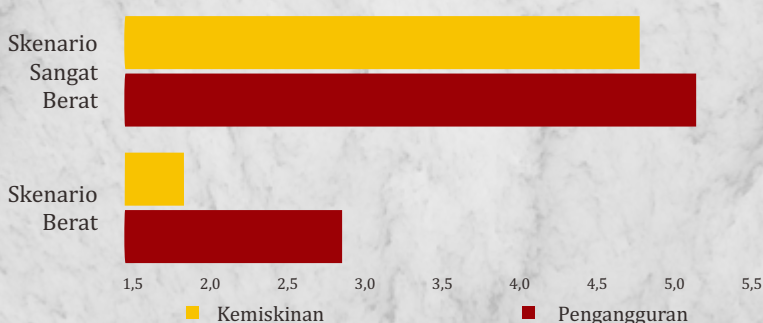


Dalam persen



Potensi Dampak Sosial Covid-19

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2020



Dalam juta jiwa

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	46,845	18,735	2,500
Seluruh Dunia	8,963,253	4,440,417	468,485

Update : 22 Juni 2020 Pukul 16.00 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

TAK SINKRON, SURABAYA SERING KEMBALIKAN DATA TRACING KE PEMPROV

Surabaya- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seringkali mengembalikan data terkonfirmasi positif Covid-19 ke Pemprov Jatim. Lasannya, seringkali data yang diberikan Pemprov untuk ditracing tidak sinkron dengan yang ada di lapangan.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita memastikan data yang tidak sinkron itu adalah data awal untuk dilakukan tracing atau pelacakan ke lapangan. Ditegaskannya, bukan data yang sudah fix disampaikan kepada masyarakat melalui media.

"Jika data awal untuk tracing itu tidak sinkron dengan data di lapangan, maka pasti tidak bisa di entry ke aplikasi kami, tidak bisa dimasukkan ke data Surabaya, karena memang setelah ditracing tidak ada orangnya," kata Febria, Senin (22/6).

Menurut Febria, data yang tidak sinkron itu karena beberapa hal, ada nama dan alamatnya ganda, ada juga nama yang tidak ada orangnya ketika dilacak ke alamat yang telah dicantumkan. Banyak pula yang ber-KTP Surabaya, tapi tidak tinggal atau sudah tidak berdomisili di Surabaya, seperti salah satu warga yang ber-KTP Surabaya tapi sudah kerja dan sudah berdomisili di luar daerah.

Bahkan, ada juga yang memakai alamat KTP saudaranya ketika periksa di Surabaya, padahal orang tersebut tidak tinggal di Surabaya. "Nah, data-data semacam ini tentu tidak bisa masuk ke data Surabaya, karena

memang tidak ada orangnya," tegasnya. Febria memastikan banyak kasus seperti ini, sehingga terpaksa data orang tersebut harus dikembalikan lagi ke pemprov karena tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Sayangnya, keesokan harinya data orang itu dikembalikan lagi ke Surabaya, muncul lagi di data Surabaya. Padahal sudah disampaikan bahwa orang tersebut tidak berdomisili di Surabaya, seperti data pasien berinisial Hery yang sudah 10 tahunan tinggal di luar Surabaya. Seharusnya kan provinsi yang mencari dimana dia tinggal. Ini provinsi malah meminta kita mencari alamatnya di luar Surabaya itu. Pastilah kita kesulitan, seharusnya itu sudah bukan tugas kita, harusnya itu tugas provinsi yang mencarinya. Dan data Hery ini bolak balik muncul di data Surabaya," ujarnya.

Febria juga memastikan, data-data yang dikembalikan ke Pemprov itu sudah benar-benar dilakukan tracing ke lapangan. Ia juga memastikan selama data pasien itu masih bisa dilacak, pasti petugas tracing di lapangan tidak akan pernah menyerah. "Karena dari awal kita sudah tracing massif," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser menjelaskan, Dinas Kesehatan Surabaya sudah memiliki aplikasi khusus untuk mengawal data tracing itu. Sehingga data pasien terkonfirmasi yang dikirim oleh pemprov untuk dilakukan tracing itu



Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita

langsung dimasukkan ke aplikasi dan langsung dibagi ke berbagai puskesmas yang ada di Kota Surabaya.

"Jadi, tidak mungkin data itu double karena itu pakai NIK dan ada alamatnya juga. Kalau memang NIK dan alamatnya lengkap dan benar, pasti petugas kami tidak akan kesulitan untuk melakukan tracing di lapangan," kata Fikser.

Makanya, ketika ada data yang dikembalikan ke Pemprov, berarti data itu memang benar-benar tidak ditemukan di Surabaya. "Seperti yang dicontohkan Bu Kadinkes, jika orang itu sudah 10 tahunan di luar Surabaya, pasti kami susah untuk melacak domisilinya, belum lagi kami harus terus bekerja keras dan masif melakukan tracing pasien Covid-19 yang baru, jadi ya kasus-kasus seperti ini sudah seharusnya tugasnya pemprov," pungkas Fikser. (ard)

TRANSISI NEW NORMAL, PEMKOT BLITAR SERTIFIKASI FASILITAS UMUM

Blitar - Kota Blitar mulai memantapkan diri memasuki New Normal Life. Buktinya di masa transisi menuju kehidupan normal baru, Pemkot melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar, memberikan sertifikasi terhadap fasilitas umum yang memenuhi standar protokol kesehatan.

Seperti dilakukan di Stasiun Kereta Api dan Terminal Patria, Forkopimda Kota Blitar memberikan sertifikat sebagai tanda jika fasilitas moda transportasi tersebut layak memasuki New Normal. "Dari sisi sarana prasarana protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sudah memenuhi syarat," tutur Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela, Senin (22/6).

Dijelaskan AKBP Leonard setelah dinilai memenuhi syarat, maka diresmikanlah menjadi Stasiun dan Terminal Tangguh Semeru. "Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khusus fasilitas moda transportasi yang diutamakan ketangguhan dalam penerapan protokol kesehatan dalam masa transisi menuju New Normal," jelasnya.

Dari Pemkot Blitar melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sudah memberikan standar protokol kesehatan yang harus ada di moda transportasi. "Kita

datang untuk melakukan pengecekan, asistensi dan pemeriksaan, hasilnya stasiun dan terminal Kota Blitar sudah memenuhi standar protokol kesehatan," ungkap AKBP Leonard.

Sementara kehadiran anggota TNI-Polri membantu mengawasi dan pendisiplinkan, penerapan protokol kesehatan tersebut. Oleh internal petugas stasiun dan terminal, baik penumpang yang berangkat maupun datang semuanya harus menjalani protokol kesehatan. "Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, menyediakan handsanitizer dan menjaga jarak. Termasuk di dalam kereta dan angkutan bus, juga diterapkan physical distancing," paparnya.

Ditambahkan AKBP Leonard saat ini, ada pos untuk mendisiplinkan membantu pihak stasiun, nanti akan dicabut diganti personel TNI - Polri dibantu Sat Pol PP. "Setiap tempat umum, minimal disiagakan 2 personel dari TNI dan Polri. Termasuk patroli pendisiplinan, yang terus mobile di tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran protokol kesehatan," pungkasnya.

Secara terpisah setelah menyerahkan sertifikasi fasilitas umum, Walikota Blitar Santoso mengatakan, "Akan dilakukan



Forkopimda Kota Blitar mengecek kesiapan stasiun dan terminal tangguh, sebelum penyerahan sertifikasi standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19

evaluasi dalam perkembangannya, apakah pola-pola protokol kesehatan mulai dari masuk, menunggu dan sebelum naik sarana transportasi sudah diperiksa," katanya.

Dengan cara seperti inilah, penyebaran dan penularan Covid-19 di Kota Blitar bisa dicegah. Terkait penerapan New Normal, Santoso menegaskan di masa itu bukan berarti masyarakat menjadi bebas beraktifitas tanpa memperhatikan protokol kesehatan. "Justru sebaliknya, saat New Normal Life masyarakat harus lebih disiplin, dalam segala aktifitas sosial sehari-hari," pungkasnya. (ais)

KOMISI III DPR MINTA PEMBAHASAN RKUHP & RUU PEMASYARAKATAN DILANJUTKAN

Jakarta - Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI mengusulkan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasarakatan untuk dilanjutkan. Apalagi, kedua RUU itu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020.

"Kita punya pekerjaan tertunda, RUU PAS dan RKUHP. Nah saya berpendapat ini harus dilanjutkan apalagi dulu ketika di akhir masa sidang ada lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah yang diwakili pak menteri sudah sepakat bahwa ini akan jadi prioritas yang kita lanjutkan. Oleh karena itu masuk ke prolegnas prioritas 2020, tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan," ucap Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly, Senin (22/6).

Dia menambahkan RKUHP dan RUU Pemasarakatan merupakan RUU Carry Over yang harus dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024. Lebih lanjut, Arsul Sani menyatakan pihaknya meminta Yasonna menyampaikan usulan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komisi III DPR RI juga akan meneruskan ke pimpinan DPR RI untuk bersurat ke Presiden.

"Pak Menteri tentu memang nanti sampaikan ke Presiden, tapi Komisi III juga nanti sampaikan surat ke pimpinan untuk bersurat ke Presiden untuk meneruskan.

Karena ini gak bergerak UU berikutnya ada RUU MK, RUU Jabatan Hakim yang inisiatif DPR ini gak bergerak, karena ini gak jalan," ujarnya.

Senada dengan Arsul, Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi Golkar Adies Kadir juga mengusulkan agar pembahasan kedua RUU itu dilanjutkan. Sebab, komitmen pembahasan kedua RUU itu menjadi kesimpulan di beberapa kali rapat dengan Kemenkumham.

"Komisi III mendesak Kemenkumham tindak lanjuti target penyelesaian legislasi RKUHP dan RUU Pemasarakatan," ucapnya.

Seperti diketahui, beberapa RUU ditunda pembahasannya akibat pandemi corona. Untuk RUU Pemasarakatan sendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan secara substansi menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, terdapat sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang membahagiakan koruptor. Padahal, kejahatan korupsi diakui secara internasional sebagai extraordinary crime, white collar crime, dan transnational crime yang berimplikasi mewajibkan setiap negara menerapkan aturan-aturan yang khusus bagi pelaku kejahatan finansial ini.



Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani

Mulai dari hukum acara, materiil, bahkan sampai perlakuan terhadap terpidana korupsi di lembaga pemasarakatan (lapas). "Melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU-Pas ini rasanya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan juga pemerintah," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya Mei lalu.

Dikatakan, RUU Pemasarakatan tidak secara jelas memaknai konsep pemberian hak kegiatan rekreasi pada tahanan maupun narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 huruf c.

Data yang dihimpun ICW setidaknya mencatat tujuh terpidana yang diduga melakukan plesiran saat menjalani masa hukuman di lapas, seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq; Anggoro Widjojo; mantan Wali Kota Palembang Romi Hertan dan istrinya Mas-yito; mantan Wali Kota Bogor Rachmat Yasin; mantan Bendum Partai Demokrat Naza-ruddin; hingga mantan Ketua DPR Setya Novanto. (ist)

POLEMIK WARGA PERUMAHAN WISATA BUKIT MAS

DPRD SURABAYA GERAM, PENGEMBANG DINILAI MEMBANGKANG

Surabaya-DPRD Kota Surabaya menggelar rapat hearing terkait pengaduan warga Wisata Bukit Mas soal meningkatnya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) serta penggunaan Fasum dan Fasos yang dikenakan iuran. Wakil rakyat meminta penegakan hukum secara progresif karena pengembang dinilai membangkang dan melanggar peraturan.

Pengacara warga Wisata Bukit, Mas Tony Suprayitno mengatakan pengaduan kepada DPRD kota Surabaya ini berawal dari keluhan warga yang keberatan kenaikan IPL. Sebab dalam pembelian rumah, tidak dicantumkan kenaikan IPL setiap tahun.

"Akan tetapi faktanya setiap tahun warga harus membayar iuran IPL yang tidak masuk akal dan naik terus. Bahkan saat warga ingin melakukan negosiasi, pengembang mesti ditolak," ujarnya saat selesai melakukan hearing dengan Komisi A, Senin (22/6).

Lebih parahnya, lanjut Tony, jika terdapat salah satu warga yang ingin mere-novasi rumah tetapi belum lunas membayar IPL tidak diizinkan oleh pihak pengembang. Tak hanya itu, jika ada warga yang ingin menambah daya listrik, akan ditarik uang oleh pengembang. "Ini kan aneh, untuk apa ditarik uang. Dibuat apa

dana tersebut kami tidak tahu. Ini sudah hampir 10 tahun. Dari mulai tahun 2010 dan puncaknya tahun 2018," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, dari hasil hearing tersebut pihak Pemkot Surabaya tidak bisa bicara selain pada produk Perwali dan Perda-nya. "IPL itu diterapkan oleh pengembang bila itu di apartement, kalau perumahan tidak bisa. Apalagi sudah laku sampai 90 persen. Bila ada kejadian di lingkungan, jadi tanggung jawab RT/RW. Jadi boleh kalau RT / RW yang menghimpun dana untuk kesejahteraan lingkungan. Ini ternyata fasum fasos belum diserahkan. Bila dilihat berdasarkan Perda dan Perwali itu salah," ujarnya.

Terpisah, anggota komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni dalam hearing mengatakan kaget ketika pengembang menggugat SK yang dikeluarkan oleh camat. Menurutnya ini suatu pembangkangan.

"Di sisi lain ada OPD yang masih lingkungan satu perkantoran dengan Pemkot Surabaya hanya memberikan teguran-teguran ini menurut saya anomali. Jadi mestinya ketika pengembang itu melawan pemkot dan menggugat keabsahan produk yang dikeluarkan di pengadilan, mestinya OPD yang lain melakukan pressing yang sama



Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna

dengan pengembang ini," tegasnya.

Fathoni mengatakan, pembentukan RT dan RW adalah domainnya pemerintah kota, tidak ada urusannya dengan pengembang. Terlebih jika perlu pengembang Wisata Bukit bila mengajukan apapun sebaiknya ditolak. Menurutnya ini penghinaan dan pelecehan terhadap kehormatan pemkot.

"Hubungan pengembang dengan pemilik selesai manakala jual beli ditanda tangani. Fasum dan fasos itu mestinya kalau pengembang berpotensi nakal, Pemkot pro-aktif. Kalau hanya surat menyurat saya pikir wajar ketika Pemkot agak diabaikan," tegasnya. (ard)

ZONA MERAH DI JATIM TERSISA 7 WILAYAH, MADIUN PERTAHANKAN HIJAU

Surabaya- Zona merah atau zona berisiko tinggi penularan virus corona atau Covid-19 di Jawa Timur terus berkurang. Kini zona merah penularan Covid-19 di Jatim hanya tersisa di 7 kota/ kabupaten saja.

Daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim ada di Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto. Penetapan zona tersebut sesuai penentuan dari BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat.

Sedangkan untuk zona oranye atau daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19 yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan.

Berikutnya untuk zona kuning atau daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim meliputi Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan.

Sementara, Kota Madiun menjadi daerah pertama di Jatim yang berubah statusnya menjadi zona hijau atau daerah tidak terdampak penularan Covid-19. Dengan predikat ini, Walikota Madiun, Maldi tetap tak henti-hentinya mensosialisasikan ke-

pada warga tentang pentingnya protokol kesehatan.

Bersama Forkopimda dan OPD terkait walikota menyusuri titik-titik perbatasan Kota Madiun mulai dari timur hingga ke barat. Dalam kunjungan tersebut, mantan sekda kota itu kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa lokasi.

"Ini kita siapkan semua, mobil penyemprot juga sudah kita siapkan, logistik sembakonya siap. Mana-mana yang harus kita sosialisasikan lagi kita ingatkan kepada warga lagi. Saya akan cek pos masuk kota mulai dari Jalan Agus Salim Panglima Sudirman, Mastrip, Patung dan Rejoagung," katanya, Senin (22/6).

Lebih lanjut Maldi mengatakan, kendati sudah mendapatkan predikat zona hijau covid-19 se Jawa Timur (Jatim), walikota berpesan kepada warga agar tetap mempertahankan kebiasaan pola hidup sehat yang sudah dilakukan selama ini.

Sehingga masyarakat Kota Madiun wajib mentaati protokol kesehatan dan melekat menjadi budaya sehat untuk kehidupan sehari-hari. Bagi warga yang belum melekat terhadap protokol kesehatan kita ingatkan, baik itu secara pribadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Bakorwil Malang mengatakan, "Alhamdulillah, ini pecah telur zona hijau di Jatim. Tentu kita bersyukur bahwa Kota Madiun menjadi daerah pertama di Jatim yang menjadi zona hijau. Semoga segera disusul dengan daerah lain Jatim menjadi hijau," katanya.



Walikota Madiun, Maldi mensosialisasikan protokol kesehatan selama pandemi di jalan-jalan protokol

Khofifah menjelaskan, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tingkat kematian kasus COVID-19 di Kota Madiun nol atau CFR 0 persen.

"Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun selama 3 bulan tercatat hanya ada 7 orang. Testing melalui rapid test juga telah dilakukan secara massif yang dilanjutkan dengan pemeriksaan TCM. Selain itu, tren penambahan jumlah pasien positif COVID-19 sangat rendah, rata-rata hanya bertambah 1 orang setiap 1-2 minggu," jelasnya. (Sur)

TERTINGGI DI INDONESIA, PELAKSANAAN RAPID TEST DI JATIM CAPAI 213.211

Surabaya- Dalam rangka menjangkau deteksi kasus Covid-19 di 38 kabupaten/kota, Pemprov Jatim terus memasifkan pelaksanaan Rapid Test, Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Polymerase Chain Reaction (PCR) secara massif. Tes ini khususnya diutamakan bagi orang tanpa gejala (OTG) hingga bagi para Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan dengan massifnya testing dan tracing yang dilakukan maka akan terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19. Bahkan, berdasarkan data yang ada dalam seminggu terakhir konfirmasi yang terdeteksi juga terus meningkat.

"Sampai hari ini, rapid test yang dilakukan di Jatim menjadi yang tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 213.211. Dimana, sebanyak 198.160 test dilakukan oleh dinas kabupaten/kota dan 16.051 oleh Tim Covid-19 Hunter Jatim," kata Gubernur Khofifah, Senin (22/6).

Jumlah rapid test masal ini lanjut Khofifah,

juga lebih tinggi dari beberapa wilayah di Jawa. Antara lain berdasarkan data website resmi dari DKI Jakarta jumlah rapid testnya sebanyak 198.160 dan Jawa Barat sebanyak 156.674 tes.

"Untuk Tim Covid-19 Hunter yang diterjunkan Pemprov Jatim telah melakukan testing di 19 kabupaten/kota. Dan berhasil melakukan tes sebanyak 16.051 test dengan hasil 496 reaktif yang selanjutnya di swab dan ditemukan 115 kasus positif," urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Khofifah menambahkan, saat ini laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan PCR meningkat dari 11 laboratorium rujukan menjadi 27 laboratorium rujukan. Serta, untuk pemeriksaan TCM meningkat dari 12 laboratorium menjadi 17 laboratorium.

"Dengan peningkatan laboratorium ini pemeriksaan secara kumulatif naik dari 43.296 menjadi 53.503 test dalam satu minggu," papar dia.

Selain itu, untuk memastikan optimali-



Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa

sasi pemeriksaan swab Dinkes Provinsi juga telah melatih dan mengerahkan pegawai puskesmas dan rumah sakit di 38 kabupaten/kota.

Dengan dukungan SDM yang memadai, jumlah rapid test yang massif, dan tersedianya mesin PCR maka deteksi Covid-19 di Jatim akan lebih cepat. Serta, tracing ratio juga diharapkan makin meningkat dimana 1 pasien minimal bisa ditemukan 20 kontak eratnya sehingga bisa segera dites dan isolasi.

"Kita optimistis dengan deteksi dan tracing yang lebih baik, maka penyebaran mata rantai Covid-19 di Jatim bisa segera dihentikan," pungkas mantan Menteri Sosial ini. (ufi)

PILKADA 2020, PETUGAS DATANGI PEMILIH PDP & ODP COVID-19

Jakarta - DPR dan Kementerian Dalam Negeri secara resmi menyetujui usulan Peraturan KPU untuk Pilkada Serentak 2020. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasien Covid-19 harus tetap bisa menyalurkan hak Surabaya.

Untuk itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, KPU kabupaten/kota bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melakukan pendataan pemilih paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya, petugas akan membawa perlengkapan pemungutan suara di lokasi pemilih dirawat.

"KPPS dapat didampingi PPL atau pengawas TPS dan saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi pemilih yang bersangkutan," kata Arief dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (22/6).

Terkait pemungutan suara di rumah sakit, KPU setempat berkoordinasi dengan rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Petugas yang datang ke rumah sakit pun wajib memakai APD lengkap. "KPPS yang bertugas mendatangi pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19," tutur Arief.

Selain itu, juga diatur pula pelayanan hak pilih bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Arief mengatakan, KPPS dapat melayani hak pilih ODP/PDP dengan mendatangi pemilih yang bersangkutan. "KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan PPL atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih," sebut dia.

Pelayanan hak pilih bagi ODP/PDP juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. "KPPS yang bertugas mendatangi pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19," kata Arief. Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 mendatang. Sementara itu, tahapan Pilkada 2020 sudah mulai dilanjutkan lagi pada 15 Juni 2020, setelah sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa meminta KPU terus melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 guna menjamin kesehatan seluruh elemen yang terlibat.



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Arief Budiman

"Guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan tahun 2020," katanya.

Selain itu, DPR juga meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan optimal selama tahapan penyelenggaraan Pilkada. "Terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat menceraikan demokrasi," kata Mustofa. (ist)

KPU SURABAYA AJUKAN TAMBAHAN ANGGARAN RP 75 MILIAR

Surabaya- Pilkada serentak tahun ini memang beda dengan sebelumnya karena penyelenggara harus memastikan memenuhi persyaratan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran pandemi Covid-19. Untuk itu, dari anggaran Rp 101 miliar yang sudah disahkan, KPU mengajukan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 75 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.

"Anggaran yang sudah digedok Rp 101 miliar itu pada kondisi normal. Karena Pandemi Covid-19, kami mengajukan tambahan lagi anggaran Rp 75 miliar," ujar Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, Senin (22/6).

Penambahan anggaran Rp 75 miliar itu karena ada perubahan seperti pembelian alat pelindung diri (APD) bagi petugas hingga KPPS. Serta penambahan tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap TPS pada kondisi normal sebanyak 800 daftar pemilih tetap (DPT). Karena adanya Pandemi Covid-19, maka jumlah DPT di setiap TPS berubah menjadi 500 pemilih. "Pada kondisi normal sebanyak 4.121 TPS. Karena adanya Pandemi Covid-19, jumlahnya menjadi 5.161 TPS," beber Nur Syamsi.

Berdasarkan surat edaran dari KPU RI, mensyaratkan di setiap pelaksanaan tahapan menggunakan APD sesuai protokol kesehatan Covid-19. "Dengan kondisi tersebut, konsekuensinya ada penambahan

anggaran," tuturnya.

Jika dikalkulasikan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 176 miliar. "Kami belum bisa ngomong karena belum ada surat resminya. Yang sudah resmi anggaran yang Rp 101 miliar. Yang Rp 75 miliar belum tahu, karena masih kami usulkan," tambahnya.

KPU Surabaya juga telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara serentak di masing-masing kecamatan pada Senin (15/6). Namun ada 10 kecamatan yang petugas PPS-nya tidak hadir yaitu Kecamatan Benowo, Dukuh Pakis, Gununganyar, Kenjeran, Mulyorejo, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari dan Wonocolo. Sisa PPS yang sempat tidak hadir, akhirnya menyusul dilantik oleh KPU Surabaya di 10 kecamatan, pada Minggu (21/6). "Pelantikan susulan PPS-nya sudah. Jadi semua PPS sudah dilantik," tegas Nur Syamsi.

Dia menjelaskan tahapan Pilwali Surabaya 2020. Pada 24 Juni hingga 12 Juli yaitu verifikasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. "Untuk pendaftaran pasangan calon yang diusung partai, waktunya masih lama. Sekitar September pendaftarannya," tandasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Irvan Widyanto mengungkapkan, pelaksanaan pilwali Surabaya sudah dipastikan pada 9 Desember. Tahapan pilwali kembali diaktifkan pada 15 Juni. Irvan mengungkapkan, koordinasi yang



KPU Surabaya resmi melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilwali 2020

utama terkait dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Misalnya, harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, pertemuan dengan mengumpulkan banyak orang diperketat.

"Tugas kami memastikan bahwa protokol kesehatan itu dijalankan," jelas Irvan yang juga menjadi wakil sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar mengungkapkan, pihaknya tentu menyesuaikan dengan tahapan-tahapan pilwali yang dibuat KPU. Bawaslu akan memastikan bahwa penyelenggaraan pilwali itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan yang paling mendasar bisa jadi penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). (ist)

A portrait of Maria Harfanti, a woman with her hair styled in a high bun, wearing a black and gold lace dress and large earrings. The background is a solid light brown color.

Maria Harfanti

**DENGAN MENGAJAR,
JUSTRU BELAJAR LEBIH BANYAK**

Foto : www.missindonesia.co.id

Di tengah masa pandemi Covid-19 tidak semua murid sekolah bisa terbantu mengenyam pendidikan melalui jaringan internet.

Selain dihadang persoalan keterbatasan ekonomi, banyak wilayah terpencil tidak memiliki jaringan internet.

"Pemerataan pendidikan masih kurang. Ketika terlibat untuk sekolah binan di Pandeglang, Banten, saya menjumpai aliran listrik masih sangat terbatas. Tanpa jaringan internet pula," ujar Maria Harfanti (28) mantan Miss Indonesia 2015.

Maria, sapaan akrabnya adalah pendiri Yayasan Bangun Sekolah Indonesia. Yayasan yang didirikan pada tahun 2008 itu mengemban misi sosial, terutama untuk pemerataan sarana pendidikan.

Saat ini sekolah binaan itu selain berada di wilayah Banten, juga ada di Legok, dan Citeureup, Bogor.

Proses belajar jatak jauh yang tidak bisa dilangsungkan itu memaksa kelas tatap muka tetap diselenggarakan. Jadwalnya menyesuaikan kebutuhan, yakni kadang dua kali atau tiga kali dalam seminggu.

Perempuan yang menjadi runner up Miss World 2015 ini memang memilih terjun ke bidang sosial pendidikan.

Selain fokus pada pemerataan sarana dan kesempatan belajar, Maria ternyata juga senang mengajar.

"Dengan mengajar, ternyata kita justru belajar lebih banyak," ucap Maria, mengutip Koran Kompas (Senin, 22/6/2020).

Maria mengikuti kontes kecantikan Miss Indonesia 2015 mewakili provinsi DI Yogyakarta dan terpilih sebagai pemenang menggantikan Miss Indonesia 2014 Maria Rahajeng. Dalam kontes yang digelar pada tanggal 16 Februari 2015 tersebut, Maria berhasil menyisihkan 33 kontestan lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam kontes ini, Maria sukses menjawab pertanyaan dari ketua dewan juri Liliana Tanoesoedibjo mengenai program kerja apa yang akan dilakukannya jika menang nanti.

"Saya akan menjadi pribadi yang berintegritas dan berkontribusi bagi masyarakat. Saya juga akan mempromosikan penggunaan produk lokal dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia luar."

Di kontes kecantikan Miss World 2015 yang digelar pada tanggal 19 Desember 2015 di Sanya, China, ia menempati posisi Runner-up 2 dan penghargaan khusus Beauty with a Purpose dan juga berhasil pada posisi

13 Besar Best Talent, 25 besar People's Choice Award dan 10 besar World Fashion Designer Dresses.

Maria adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Saat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, ia terpilih sebagai delegasi kampusnya dalam International Conference of Business Economics and Accounting di Thailand.

Ia juga pernah menjadi peserta dalam sebuah program pertukaran pelajar internasional pada tahun 2012 dan menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak tidak mampu di provinsi Guizhou, China.

Semasa kuliah, Maria aktif mengajar sebagai asisten dosen untuk kelas reguler dan internasional serta menjadi karyawan sementara di Bank Indonesia. Setamat kuliah, Maria sempat bekerja di Nestlé Indonesia.

Maria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada 2014. Ia tercatat sebagai mahasiswi lulusan tercepat dari Fakultas Ekonomi Trisakti angkatan 2010. Ia fasih berbahasa Inggris, Mandarin dan Perancis.

Meskipun lahir dan besar di Jakarta, Maria memiliki pertalian erat dengan daerah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ibunya berasal dari Yogyakarta. Sementara ayahnya berasal dari Klaten, Jawa Tengah (Ist).



Foto : lokadata.id



PENELITIAN:

MAKAN MALAM

LEBIH AWAL

BAIK UNTUK

KESEHATAN

Makan malam sering dianggap sebagai kebiasaan yang buruk. Alasan yang sering didengar adalah karena makan malam bisa bikin gemuk. Padahal sebetulnya, jika dilakukan dengan cara yang tepat, manfaatnya sangat besar.

Dengan makan malam lebih awal. Sebaliknya, menurut beberapa penelitian, makan larut malam berhubungan dengan diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

Dikutip dari Telegraph, para peneliti dari Perelman School of Medicine di University of Pennsylvania menemukan bahwa makan larut malam dapat menaikkan kadar glukosa dan insulin, yang menyebabkan diabetes tipe 2.

Mereka juga melihat bahwa waktu makan malam yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau terkena serangan jantung.

Hal senada diungkapkan oleh Dr Ebru Özpelit, associate professor bidang kardiologi di Dokuz Eylül University, Turki. Ia mengatakan bahwa bagaimana Anda makan sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. "Sarapan itu penting. Begitu juga makan siang, Anda tidak boleh melewatkan makan siang. Sedangkan untuk makan malam, sebaiknya dalam porsi kecil dan tidak boleh lebih dari jam 7 malam."

Lalu, apa saja keuntungan kesehatan yang Anda dapat dari makan malam lebih awal. Dilansir Eatingwell.com, ini lima manfaatnya:

1. Pinggang lebih ramping

Menurut sebuah studi yang dimuat di Cell Metabolism, tikus yang makan malam lebih awal dan berpuasa selama 16 jam setelahnya memiliki bentuk pinggang yang lebih ramping. Para peneliti menduga, makan malam lebih awal memungkinkan tubuh untuk memproses makanan secara lebih efisien.

Selain itu, para peneliti memperhatikan bahwa tikus yang diberi diet tinggi lemak namun berpuasa 16 jam setelahnya, kenaikan berat badannya tidak sebanyak tikus yang makan lebih sering.

2. Tidur lebih nyenyak

Menurut National Institutes of Health, makan larut malam dapat menimbulkan masalah pencernaan yang mengganggu tidur. Hal serupa berlaku untuk alkohol, berbanding terbalik dengan anggapan masyarakat bahwa minum alkohol bikin tidur lebih nyenyak.

Faktanya, kebiasaan makan larut malam membuat tidur tidak nyenyak karena berbenturan dengan sistem pencernaan yang masih bekerja. Menurut penelitian di University of Michigan, Amerika Serikat, gangguan tidur ini lebih riskan dialami oleh wanita.

3. Kesehatan yang lebih baik

Orang yang makan larut malam cenderung makan lebih banyak. Lebih lanjut, makan larut malam dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah.

Karena ketika Anda makan, tubuh akan mengubah kalori yang tidak langsung dipakai menjadi trigliserida.

Penting diketahui bahwa kadar trigliserida yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Alangkah pentingnya menjaga porsi dan durasi waktu makan malam demi meningkatkan kesehatan Anda.

Saat makan malam, disarankan untuk menghindari karbohidrat simpleks (nasi putih, roti putih), apalagi jika terlalu berlebih, karena dapat membuat gula darah naik. Asupan tinggi garam dan lemak seperti junk food tentunya juga harus dicoret dari daftar menu makan malam.

Jika ingin menyantap makanan penutup, pilihlah buah-buahan dibanding makanan tinggi gula seperti kue-kue dan es krim.

Jangan takut untuk makan malam lagi, ya. Makan malam lebih awal tidak akan membuat Anda gemuk atau meningkatkan kadar kolesterol jika porsinya pas dan jenis makanannya bergizi seimbang (Ist).





Peneliti senior Fujitsu Genta Suzuki mencuci tangannya sambil mendemonstrasikan teknologi pengenalan AI-camera dalam sebuah wawancara dengan Reuters di laboratorium penelitian Fujitsu di Kawasaki, Jepang pada 17 Juni 2020. - Antara/Reuters.

TEKNOLOGI KECERDASAN INI BISA MENGECEK KETEPATAN CUCI TANGAN MANUSIA

Perusahaan asal Jepang yakni Fujitsu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dapat membantu mendeteksi pencegahan penularan virus corona melalui aktivitas cuci tangan.

Teknologi tersebut berupa monitor yang bisa mengenali gerakan tangan ketika mencuci tangan, termasuk apakah orang tersebut menggunakan sabun atau tidak.

"Pejabat di industri makanan dan mereka yang berada di bisnis yang berhubungan virus corona tertarik menggunakannya dan ada beberapa orang yang sudah bertanya soal harga," kata seorang peneliti di Fujitsu, Genta Suzuki (Antara, 21/6/2020).

Fujitsu mengembangkan monitor tersebut dari teknologi yang digunakan di kamera pengawas kasus kriminal, yang bisa mendeteksi gerakan yang mencurigakan.

Khusus di Jepang, monitor ini bisa mengetahui apakah orang tersebut sudah mengikuti standard Kementerian Kesehatan Jepang tentang enam langkah mencuci tangan yang benar, seperti yang dianjurkan World Health Organization (WHO).

Adapun, WHO ketika terjadi penularan virus Covid-19, meminta orang untuk mencuci tangan termasuk telapak tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuku dan pergelangan tangan. Langkah tersebut dilakukan selama 20 detik, atau setara dua kali menyanyikan lagu "Happy Birthday".

AI dari Fujitsu tidak hanya bisa mengidentifikasi seseorang dari tangan, namun, bisa dikembangkan dengan teknologi pengenalan identitas lainnya agar perusahaan bisa mengajari kebiasaan cuci tangan para pegawainya.

Untuk melatih monitor ini, Fujitsu menggunakan machine learning yang mempelajari 2.000 pola mencuci tangan, menggunakan berbagai sabun maupun bak cuci tangan.

Monitor ini juga bisa dipasang lagu "Happy Birthday" atau lagu lainnya untuk memandu cuci tangan.

Namun demikian Fujitsu belum menentukan secara resmi untuk memasarkan monitor tersebut. Monitor ini bisa digunakan untuk, keperluan dan fungsi lain di bidang kesehatan, perhotelan dan industri makanan.

Diberitakan sebelumnya, untuk membantu membiasakan cuci tangan dengan benar, Samsung meluncurkan aplikasi

Hand Wash untuk pengguna Samsung Wearable. Aplikasi ini dapat diunduh di Galaxy Store bagi pengguna Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, dan Galaxy Watch Active2.

Dasbor aplikasi Hand Wash, dapat melacak berapa lama sejak Anda terakhir mencuci tangan, serta meninjau jumlah target cuci tangan harian dan sudah berapa kali mencuci tangan sejauh ini dalam sehari.

Untuk memastikan durasi mencuci tangan selama 20 detik, aplikasi juga dilengkapi dengan fasilitas hitung mundur. Hitungan mundurnya adalah 25 detik, terdiri dari 5 detik untuk mengoleskan sabun dan 20 detik untuk menggosok.

Alat ini akan memberikan hasil haptic serta grafik begitu penghitung waktu dimulai. Selain itu, semua Galaxy Smart Watch tahan air, jadi tidak perlu melepaskannya ketika Anda mencuci tangan (Ist).





Intip Rahasia Kecantikan

KULIT ANGELINA JOLIE

FOTO : CHRISTOPHER POLK / GETTY IMAGES / AFP

Tak hanya berprofesi sebagai aktris, Angelina Jolie juga merupakan sosok yang banyak disoroti karena kerja sosialnya. Meski kesibukannya menumpuk, tapi Jolie selalu tampil maksimal. Apa sih rahasianya?

Peran Angelina Jolie sebagai ibu dari enam orang anak dan sutradara juga tak kalah mengundang perhatian. Prestasinya di dunia peran sudah diakui dunia, bahkan dia sempat meraih penghargaan Piala Oscar sebagai aktris pendukung terbaik di tahun 2000, dan nominasi aktris terbaik di tahun 2009.

Dengan berbagai aktivitasnya, Jolie juga dikenal memiliki cita rasa fesyen yang baik serta kulit yang segar dan awet muda. Pada 4 Juni lalu, Jolie baru saja menginjak usia 45 tahun. Meski usia terus bertambah, namun kecantikannya seolah tak memudar.

Rhonda Rand, dokter kulit Jolie, membeberkan kepada Refinery29, apa saja rutinitas yang menjadi rahasia kecantikan kulit Jolie. Rand mengatakan Jolie memang sudah memiliki kulit yang cantik dan indah. Oleh karena itu, perawatan kulit yang dilakukannya sebetulnya tidak terlalu banyak.

"Dia beruntung memiliki kulit zaitun cantik seperti ibunya, jadi ia tidak perlu banyak melakukan perawatan," kata Rand.

"Jolie hanya menggunakan tabir surya, mencuci wajah dengan sabun yang tepat dan lembut, antioksidan, serta produk-produk alami." Memiliki kondisi kulit dasar yang sudah bagus membuat bintang Maleficent itu tidak memerlukan scrub atau produk lainnya yang mengandung bahan kimia tinggi.

Jolie juga diketahui gemar menghidrasi kulitnya serta menggunakan topi dan tabir surya saat keluar rumah. Ia juga menggunakan pelembap bahkan ketika beraktivitas di dalam ruangan, untuk mencegah perubahan warna kulit.

Banyak selebritas mungkin senang tampil dengan pulasan make up tebal, namun tidak bagi Jolie. Ia justru lebih suka dengan pendekatan tanpa make up, kecuali untuk keperluan pekerjaan. "Dia juga hebat dalam menghapus make up," kata dia. Jolie disebut sangat berhati-hati mengaplikasikan make up di wajahnya karena menginginkan kulit wajah yang cantik alami.

Tak peduli sedang bepergian ke belahan dunia mana pun, Jolie tak pernah melewat-



kan rutinitas perawatan kulitnya. Menurut sang dokter kulit, mantan istri aktor Brad Pitt itu selalu memastikan kulitnya mendapatkan produk yang tepat demi menjaga pori-pori tetap bersih.

Dia juga selalu menjaga bagaimana kulit tetap memproduksi kolagen dengan baik, dan mencegah perubahan warna kulit ketika sedang bepergian. Mau mengadopsi cara cantik ala Jolie? Mudah dan sederhana kan. (ist)

Waspada! (dari hal 1)

Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan.

Meski resesi merupakan indikator makro, namun bila itu terjadi maka guncangan ekonomi dipastikan akan menghimpit kondisi masyarakat juga. Dan untuk kali ini resesi dipicu oleh pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Tak main-main, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pandemi Corona berpotensi menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan, potensi itu bisa mengembalikannya ke level *double digit*.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, angka kemiskinan Indonesia akibat pandemi COVID-19 berpotensi menjadi 10,63% atau kembali ke level *double digit*. "Tanpa intervensi, tingkat kemiskinan bisa mencapai 10,63%, naik 4 juta orang dari 24 juta menjadi 28 juta," kata Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan berada di level 9,22% per September 2019. Angka itu menurun sebesar 0,19% dari posisi Maret 2019 dan 0,44% dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia.

Menurut Suharso, pandemi Corona berpotensi menambah angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 4 juta orang. Dengan begitu, totalnya akan menjadi 28,7 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berharap dapat menahan peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia, salah satunya melalui program perlindungan sosial alias bansos.

Suharso berharap, melalui program tersebut bisa menekan jumlah orang miskin baru menjadi sekitar 1,2 juta hingga 2,7 juta orang, sehingga angka kemiskinan masih berada di level *single digit*. "Dan mudah-mudahan secara rasio masih bisa satu digit," kata dia.

Perlu diketahui, anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Kenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah direlaksasi namun publik tidak *spending* alias berbelanja maka Indonesia bisa jatuh ke jurang resesi.

Dalam proyeksi Kemenkeu, dengan adanya biaya penanganan Covid-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang direlaksasi namun dengan dukungan belanja maka kuartal III dan IV PDB bisa tumbuh 1,4%.

"Tapi kalau dalam [dengan asumsi tidak berbelanja] bisa -1,6%. Itu *technically* bisa resesi. Kalau kuartal III negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi," papar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Skenario tersebut masuk ke dalam proyeksi Kemenkeu. Di mana pada kuartal III dan IV PDB akan tumbuh 1,4% sampai negatif 1,6%. "Sementara outlook seluruh tahun -0,14 sampai positif 1 persen," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa 2020 adalah tahun yang luar biasa. Bukan dalam konteks yang positif, tetapi tantangannya yang sangat besar. Akibat pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019.Covid-19), lanjut Sri Mulyani, Bank Dunia memperkirakan ekonomi global berkontraksi atau tumbuh negatif -5,2%. "IMF (Dana Moneter Internasional) kita akan lihat beberapa bulan ke depan, biasanya outlook Juli. Pasti ada revisi," katanya.

Indonesia, tambah Sri Mulyani, tidak terkecuali. Pada kuartal II-2020, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan kontraksi ekonomi nasional akan sebesar -3,1%. "Pada kuartal II akan ada kontraksi karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan dan memberi kontribusi ke pertumbuhan ekonomi yang besar. Ini akan mempengaruhi kuartal II yang kita perkirakan -3,1%," katanya. Jika dalam dua kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia negatif maka sudah pasti masuk zona resesi.

Jawa Sumbang 58,4% Kasus

Wilayah di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang kasus corona tertinggi di Indonesia. Menurut riset dari Alvara Research, hingga 21 Juni 2020, ada 58,4 persen dari total kasus di Indonesia. Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Jakarta menjadi penyumbang kasus terbanyak, bersaing secara ketat dengan Jawa Timur," kata peneliti Alvara Research Hasanudin Ali dalam Weekly Report COVID-19 periode 15-22 Juni yang dilansirnya pada Senin (22/6).

Pertumbuhan kasus corona di Jawa masih tinggi dinilai karena kepadatan penduduk yang tinggi. Juga mobilitas warganya yang juga relatif tinggi. Hasanudin mengingatkan pemda dan pemerintah pusat untuk memegang teguh protokol kesehatan menyusul pelonggaran ekonomi di masa pandemi.

"Relaksasi kegiatan ekonomi secara otomatis meningkatkan mobilitas penduduk, bila tidak diimbangi dengan penegakan regulasi protokol kesehatan yang ketat, kondisi seperti ini akan terus terjadi sehingga upaya untuk melandaikan trend kasus COVID-19 akan berlangsung sangat lama," ungkap Hasanudin.

Terpisah, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, Jawa Timur masih menjadi provinsi terbanyak yang menyumbangkan kasus baru hari ini, yaitu 315 kasus dan pasien sembuh 66 pasien. Posisi kedua ditempati DKI Jakarta dengan tambahan kasus baru sebanyak 127 orang dan sembuh 74 pasien. Sedangkan posisi ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan tambahan kasus baru sebanyak 111 kasus dan pasien sembuh 38 orang.

Dua provinsi lain yang masuk lima besar adalah Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan, masing-masing adalah 89 kasus baru untuk Kalsel, dan 60 kasus baru di Sumsel. Yurianto mengatakan, per hari ini terdapat 19 provinsi yang melaporkan kasus baru di bawah 10 orang. Sedangkan 11 provinsi tidak ada penambahan kasus baru sama sekali.

Berdasarkan data terbaru, pasien Covid-19 yang dilaporkan sembuh hari ini bertambah 331 kasus, sehingga total menjadi 18.735 pasien. Sementara kasus meninggal bertambah 35 orang, total 2.500 kasus. Sementara itu, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 43.500, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 12.999 orang. (ist,ins)

MASUK DAERAH ZONA KUNING, PEMKAB BLITAR SIAPKAN ATURAN NEW NORMAL

Blitar - Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Blitar dalam mencegah penyebaran dan memutus rantai penularan Virus Covid-19 akhirnya membuahkan hasil. Bila sebelumnya Kabupaten Blitar berstatus zona merah, pada Minggu (21/6/2020) berhasil menjadi wilayah zona kuning corona.

Dengan perubahan menjadi daerah zona kuning, maka Kabupaten Blitar memasuki transisi menuju New Normal atau kenormalan baru yang produktif dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di segala bidang.

Penetapan zona tersebut sesuai penentuan dari BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat. Daerah yang masuk zona kuning atau daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 meliputi : Kabupaten Madiun, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Blitar. Selanjutnya Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

Bupati Blitar, Rijanto ketika dikonfirmasi mengenai perubahan status dari daerah zona merah menjadi zona kuning, menuturkan jika kondisi ini berhasil diraih berkat kerja keras dan kekompakan warga dalam menjalankan protokol kesehatan. "Dengan disiplin yang bagus, untuk mencegah penyebaran dan memutus rantai penularan Covid-19 di berbagai bidang kehidupan," tutur Bupati Rijanto, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut dijelaskan orang nomor satu

di Kabupaten Blitar ini, langkah selanjutnya Pemkab bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar memproses Peraturan Bupati (Perbup) mengenai New Normal Life atau Kehidupan Normal Baru, yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. "Secepatnya akan kita proses, apalagi kondisi daerah kita sudah masuk zona kuning dan semoga bisa meningkat jadi zona hijau," jelasnya.

Bahkan Bupati Rijanto yang dikabarkan akan maju lagi dalam Pilkada 9 Desember 2020 ini, menyampaikan, jika bidang yang menjadi prioritas pertama dalam masa New Normal yaitu sektor pariwisata. "Rencananya pembukaan wisata dimulai pada minggu pertama bulan Juli 2020 mendatang, namun secara bertahap. Sesuai hasil monitoring di sejumlah destinasi wisata, hasilnya mayoritas para pelaku wisata sudah siap. Dengan tetap mengutamakan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tempat wisata, sehingga kenyamanan dan keselamatan pengunjung dapat terjamin," tandasnya.

Sebelumnya, bersama Forkopimda Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto juga sudah meresmikan Kampung Tangguh Covid-19, Pesantren Tangguh Covid-19 dan Sekolah Tangguh Covid-19, sebagai langkah memasuki masa transisi new normal.

Bahkan hari ini Bupati Rijanto juga mengikuti Video Conference (Vidcon) bersama Wakil Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Ruang Command Center Kabupaten Blitar, dalam rangka penganugrahan Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru yang digelar di Gedung Sasana



Bupati Blitar, Rijanto dengan jajaran mengikuti Vidcon bersama Wapres RI dalam rangka Penganugrahan Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/6/2020).

Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Kuspardani ketika ditanya mengenai status daerah zona kuning atau daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 mengaku jika itu hasil dari perhitungan epidemiologis 15 indikator. "Bobot dan penilaiannya dievaluasi setiap hari dihitung oleh Gugus Tugas Pusat, bisa saja assesment sendiri tapi perhitungannya rumit," ungkap dr Kuspardani.

Beberapa indikator yang menjadi penilaian diantaranya upaya yang dilakukan daerah menekan penyebaran, seperti Rapid Test Massal. Kemudian kasus berhenti tidak ada penularan, tidak ada kasus baru yang melonjak dan termasuk daerah dengan risiko rendah terangnya.

Selanjutnya dikatakan dr Kuspardani segera menindaklanjuti dengan kunjungan ke fasilitas umum atau publik. "Untuk mengecek kesiapan sarana prasarana penerapan protokol kesehatan, seperti pasar, sekolah, terminal, stasiun, kantor, kampung, termasuk tempat wisata," katanya.

Ditambahkannya setelah kunjungan, juga dilakukan penilaian layanan fasilitas umum atau publik untuk memasuki new normal. "Saat ini memang sedang diproses penyusunan aturannya yaitu Perbup New Normal, yang ditargetkan Juli atau bulan depan bisa selesai," imbuhnya. (ais/adv)

AWAS INFEKSI GANDA, 410 KOTA/KAB RI 'DISERANG' CORONA DAN DBD

Jakarta - Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut saat ini sudah lebih dari 65 ribu kasus demam berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Sebagian di antaranya terjadi di provinsi dengan penularan virus Corona tertinggi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, MEpid, mengatakan beberapa provinsi yang terdapat kasus DBD dan COVID-19 tertinggi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

"Agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita melihat sampai saat ini kita masih menemukan kasus antara 100-500 kasus perhari," kata dr Nadia, sapaan akrabnya, dalam siaran langsung BNPB melalui kanal YouTube, Senin (22/6).

"Ada 68 ribu kasus demam berdarah di seluruh Indonesia, tentunya kita melihat kembali lagi provinsi yang ada, itu adalah provinsi-provinsi dengan kasus Covid tertinggi, yang juga dengan kasus demam

berdarah tertinggi," lanjutnya.

dr Nadia juga menjelaskan hampir seluruh kabupaten/kota yang melaporkan kasus demam berdarah di Indonesia juga memiliki kasus penularan Covid-19. "Dari 460 kabupaten/kota yang melaporkan kasus demam berdarah, sebanyak 410 itu adalah kabupaten/kota yang juga melaporkan adanya Covid, jadi ada infeksi ganda," jelasnya.

Nadia mengatakan, pasien yang meninggal kebanyakan tersebar di provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. "Sama kurang lebih gambarnya adalah provinsi-provinsi yang tadi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang merupakan juga kasus-kasus tertinggi akibat kematian," ucap dia. Berdasarkan catatannya, ada 439 dari 460 kabupaten/kota yang melaporkan kasus DBD juga memiliki kasus Covid-19. Hal itu disebut Nadia sebagai infeksi ganda.

Fenomena tersebut, kata Nadia, memungkinkan seseorang yang terinfeksi Covid-19 juga berisiko terkena DBD. "Karena pada prinsipnya sama, DB adalah suatu penyakit yang sampai sekarang juga belum

ada obatnya, vaksinnnya belum terlalu efektif," ucap dia. "Dan salah satu upaya untuk mencegahnya adalah kita menghindari gigitan nyamuk. Sama-sama virus ini," kata Nadia.

Meski begitu, ahli infeksi dan pediatri tropik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dr Mulya Rahma Karyanti, mengatakan pelayanan pasien demam berdarah dengue atau penyakit lain tidak akan terganggu oleh tingginya kasus Covid-19.

"Untuk pelayanan tidak terganggu, karena akan disaring ditriage di depan, semua rumah sakit akan memiliki triase yang memilah mana yang pasien Covid sama non-Covid," pungkas dr Mulya di siaran langsung BNPB. (ist)



Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Siti Nadia